

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI TAHUN 2023**

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
4.	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi Kerahasiaan dokumen
6.	Hasil penilaian Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan Dapat menimbulkan keresahan di masyarakat Berpotensi penyalahgunaan data 	Melindungi Kerahasiaan dokumen

